

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ponorogo Adalah salah satu kabupaten di jawa timur yang terletak di sisi bagianselatan. Ponorogo merupakan kota kecil yang padat akan penduduknya. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pedesaan. Namun bagi masyarakat yang lain memilih untuk melakukan dagang yaitu misalnya sebagai pedagang kaki lima. Karena menurut mereka dengan berdagang mereka lebih cepat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal ini yang lebih diminati masyarakat adalah berdagang di Pinggir jalan trotoar di sisi jalan-jalan perkotaan untuk menjajakan aneka dagangan mereka, misalnya saja di sekitar jalan Jendral Sudirman, gadjah mada, Jalan sultan agung, Jalan K.H Budhi Utomo dan Jalan Budi Utomo. Masyarakat umum biasa menyebut aktivitas berdagang mereka dengan sebutan PKL atau Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima adalah aset yang saat ini ada diPonorogo dan menjadi salah satu yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan penataan sesuai dengan peraturan daerah" yaitu Kabupaten Ponorogo khususnya. Dengan jumlah yang cukup banyak yaitu sejumlah 494 Pedagang kaki lima yang tersebar di Jalan protokol Kota Ponorogo. Sesuai Peraturan Daerah No.5 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Aloon- Aloon Ponorogo). Peraturan Daerah No.5 tahun 2011 tentang Ketertiban dan Perdamaian Komunal adalah salah satu aturan Pemerintah Daerah yang merupakan kebijakan Publik di mana pelaksanaan

kertiban umum diperlukan untuk menegaskan kebijakan tersebut. Banyak sekali muncul pedagang kaki lima terutama di kota besar dikarenakan menjadi salah satu solusi mudah untuk menghasilkan uang. Tetapi, karena menjamurnya pedagang kaki lima tersebut mengakibatkan carut marutnya penataan kota karena mereka (para pedagang kaki lima) tidak lagi memperhatikan faktor efisiensi dan faktor keindahan kota, karena mereka mementingkan bagaimana mendapatkan uang dengan cepat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat. Maka dari itu, perekonomian, baik sektor formal maupun sektor informal harus dikembangkan dengan baik dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasanya meningkat. Menurut Effendi (dalam Fernando, 2016), referensi dari skripsi atas nama Dindasuci sari dewi, menyatakan bahwa dalam “kurun waktu terakhir, sektor informal di berbagai daerah di perkotaan” di Indoensia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang amat menentukan dalam proses pembangunan, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Faktor utama dalam meningkatnya pertumbuhan sektor informal adalah karena kurangnya penyerapan tenaga kerja pada sektor informal. Ditambah dengan adanya pertambahan angkatan kerja di perkotaan yang disebabkan oleh migrasi dari desa ke kota. Pesatnya jumlah penduduk yang melakukan migrasi mengalahkan jumlah kesempatan kerja di kota. Akibatnya, terjadi pengangguran

di kota-kota besar sehingga memicu munculnya sektor-sektor informal di perkotaan (Fernando,2016).

Sektor informal memberikan kemungkinan kepada tenaga kerja yang berlebih di pedesaan untuk migrasi dari kemiskinan dan pengangguran Sektor informal sangat berkaitan dengan sektor informal di perkotaan. Sektor formal tergantung pada sektor informal terutama dalam hal input murah dan penyediaan barang-barang bagi pekerja di sektor formal. Sebaliknya, sektor informal tergantung dari pertumbuhan di sektor formal.Sektor informal kadang-kadang justru mensubsidi sektor formal dengan menyediakan barang-barang dan kebutuhan dasar yang murah bagi pekerja di sektor formal.Sektor informal kadang-kadang justru mensubsidi sektor formal dengan menyediakan barang-barang dan kebutuhan dasar yang penting dalam mengurangi tingkat pengangguran karena pelaku sektor informal menciptakan lapangan kerja sendiri dan memiliki pendapatan yang cukup untuk menghidupi semua tanggungan mereka (Samosir, 2015).

Pedagang sektor informal terutama pedagang kaki lima ini bisa dipakai sebagai penarik wisatawan dari manca negara, seperti misalnya Yogya dengan jalan Malioboronya, Tokyo-Jepang dengan Naka Okachi – Machi dan Harajukunya, Bangkok dengan jalan Petchburi dan jalan Pratunamnya, Singapura dengan Bugis street, Arab street dan Change alley-nya. Pedagang kaki lima merupakan suatu kelengkapan kota-kota diseluruh dunia dari masa dahulu. Sebagai suatu kelengkapan, pedagang kaki lima tidak mungkin dihindari atau ditiadakan. Oleh karena itu jika ada suatu pemerintahan kota ingin meniadakan

pedagang kaki lima akan menjadi kebijaksanaan atau tindakan yang sia-sia (Permanda, 2007). Setiap kota di Indonesia tak terpisahkan dari keberadaan PKL, tidak terkecuali kota Ponorogo. PKL tersebut menjual berbagai jenis macam barang dagangan, salah satunya adalah makanan dan minuman Para PKL tidak diakomodir kepentingannya sehingga para PKL menggunakan ruang publik yang dianggap strategis untuk aktivitasnya Ketiadaan peraturan yang melegalkan PKL kadang-kadang menjadi objek pemerasan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu sangat menjadi beban bagi PKL mengingat sebagian besar PKL memiliki *cashflow* yang rendah dan keuntungan usaha yang kecil yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Selain itu biasanya PKL tidak memiliki manajemen keuangan yang baik seperti pembukuan dan administrasi yang lengkap. Namun tentu mereka mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapatan maksimal (Patty, 2015) dikutip dari referensi skripsi atas nama Dindasuci sari dewi. Berikut ini adalah hasil rekapan oleh pemerintah setempat terkait Jumlah Pedagang kaki lima yang tersebar di jalan protokol Kota Ponorogo.

Tabel 1
Rekapan jumlah PKL di Kota Ponorogo tahun 2019

NO.	JALAN	JML PKL	%
1.	Juanda	77	15%
2.	Jendral Sudirman	73	15%
3.	Gajah Mada	39	8%
4.	Suromenggolo	85	17%
5.	Sultan Agung	33	7%
6.	Gatot Subroto	18	4%

7.	Soekarno Hatta	93	19%
8.	Urip Sumoharjo	27	5%
9.	Diponegoro	18	4%
10.	Ahmad Dahlan	11	2%

Lanjutan Tabel 1

11	Menur	20	4%
JUMLAH		494	100%

Sumber : Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo tahun 2019

Pedagangkakilima (PKL) selaku bagian dari pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM) berperan strategis menopang perekonomian. Oleh karena itu PKL perlu dibina dan ditopang dalam berbagai hal mencakup permodalan, keserasian dengan penataan perkotaan dan aspek lainnya.

Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang digunakan maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Modal yg dikeluarkan, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Jam kerja dan Tingkat Pendidikan terhadap Pendapatan pedagang kaki lima di Kota Ponorogo. Konsep pendapatan pada penelitian ini yaitu Pendapatan yang diperoleh dari hasil berdagang baik di tempat lapak maupun dari hasil usaha yang juga membuka dirumah yang telah dikurangi dengan biaya tenaga kerja.

Konsep perhitungan pendapatan menurut Sukirno (2004:37) dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. *Production approach* (pendekatan produksi) , adalah menghitung seluruh nilai tambah produksi barang atau jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu

2. *Income Approach* (pendekatan pendapatan), adalah menghitung seluruh nilai balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi dalam kurun waktu tertentu.
3. *Expenditur approach* (pendekatan pengeluaran), adalah menghitung seluruh pengeluaran dalam kurun waktu tertentu.

Besaran pendapatan PKL dapat dilihat melalui penerimaan total (*total revenue*) yang diperoleh PKL. Penerimaan total (*Total Revenue*) merupakan penerimaan total produsen dari setiap penjualan output yang dihasilkannya.

Firdaus & Arianti (2013) referensi dari skripsi atas nama Dinda suci sari dewi menemukan bahwa semakin lama usaha berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima, karena pedagang yang telah melakukan usaha yang paling lama lebih memahami permintaan konsumen dan lebih memahami selera keinginan konsumen sehingga penjualannya lebih meningkat dan pendapatannya akan semakin besar (Patty,2015) referensi dari skripsi atas nama Dindasuci sari dewi.

Dari uraian latar belakang penelitian tersebut maka penulis membuat judul penelitian "Pengaruh Modal, Jumlah Tenaga kerja, Jumlah Jam kerja dan Tingkat Pendidikan terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima di kota Ponorogo."

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah modal mempengaruhi pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Ponorogo?
2. Apakah Jumlah Tenaga Kerja mempengaruhi pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Ponorogo ?
3. Apakah Jumlah Jam kerja mempengaruhi pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Ponorogo ?
4. Apakah Tingkat Pendidikan Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Ponorogo?
5. Apakah Modal, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Jam Kerja dan tingkat Pendidikan secara bersamaan Berpengaruh terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima” di Kota Ponorogo

Ruang Lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari empat variabel yaitu Modal, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Jam Kerja dan Tingkat Pendidikan terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di kota” Ponorogo.

C. BATASAN MASALAH

Penelitian” ini hanya membahas Pengaruh dari Modal , “Jumlah tenaga kerja, Jumlah jam kerja” dan “Tingkat pendidikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kota ponorogo.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh modal terhadap pendapatan pedagang kaki lima di kota Ponorogo.

2. Untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Tenaga kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima di kota ponorogo.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Jam kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima di kota Ponorogo.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap pendapatan Pedagang kaki lima di Kota Ponorogo
5. Untuk mengetahui Pengaruh Modal , Jumlah tenaga kerja, Jumlah jam kerja dan Tingkat Pendidikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di kota Ponorogo

Adapun “hasil penelitian ini” diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang sektor informal, khususnya pedagang kaki lima di Kota Ponorogo
2. Sebagai bahan studi dan literatur tambahan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo sehingga dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya tentang Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kota Ponorogo.